

BAB III

OBJEK PENELITIAN DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di salah satu Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) Kabupaten Tasikmalaya yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Tasikmalaya yang berlokasi di Komplek Perkantoran Jl. Sukapura III Desa Sukaasih Kecamatan Singaparna-46415. Pemilihan objek penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan:

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki akses terhadap fasilitas kredit konsumtif, baik dari perbankan maupun lembaga keuangan lainnya, yang menjadikannya kelompok yang menarik untuk dianalisis dalam konteks literasi keuangan dan sifat materialisme.
2. Gaji Pokok dan Tambahan Pendapatan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) cenderung tetap, tetapi kebutuhan konsumtif terus meningkat, sehingga memungkinkan adanya pola kredit konsumtif yang berbeda dibandingkan sektor lain.
3. Minimnya penelitian terkait pengambilan kredit konsumtif di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah, terutama di Kabupaten Tasikmalaya.

3.1.1 Sejarah Singkat Instansi

BAPPELITBANGDA Kabupaten Tasikmalaya didirikan pada tahun 1967 dengan nama Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya (BAPPEMKA). Pada tahun 1974, melalui Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1974, BAPPEMKA berubah nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Perubahan ini merupakan langkah awal dalam menyesuaikan organisasi dengan kebutuhan pembangunan daerah yang semakin berkembang.

Seiring dengan perkembangan zaman dan diberlakukannya otonomi daerah, BAPPEDA kembali mengalami perubahan nama pada tahun 1999 menjadi Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA). Perubahan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2001 serta Nomor 8 Tahun 2004, yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

Pada tahun 2008, BAPEDA diubah kembali menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008. Perubahan ini mencerminkan penambahan fungsi dan tugas dalam perencanaan pembangunan daerah. Terakhir, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 tahun 2021, BAPPEDA berubah nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA)

BAPPELITBANGDA berperan sebagai unit penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pengembangan daerah. Dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,

BAPPELITBANGDA menjalin koordinasi dengan berbagai instansi daerah serta konsultasi dengan tingkat pusat dan provinsi. Dari tahun 1967 sampai sekarang, BAPPELITBANGDA telah mengalami beberapa kali pergantian pimpinan.

3.1.2 Filosofi Logo Instansi

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berbentuk Badan dimana membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tasikmalaya atas pelaksanaan tugas pemerintah daerah dibidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Maka daripada itu, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tidak memiliki logo khusus yang menjadi lambang atau identitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun logo yang dipergunakan adalah logo dari Kabupaten Tasikmalaya dengan penyesuaian informasi nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada kop surat atau media informasi untuk memberitahu bahwa informasi dan surat tersebut dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Tasikmalaya.

Meskipun Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (BAPPELITBANGDA) tidak memiliki logo khusus yang menjadi identitasnya, penggunaan logo Kabupaten Tasikmalaya sebagai simbol resmi tetap mencerminkan komitmen dan integritas dalam

menjalankan tugasnya. Logo tersebut biasanya diadaptasi dengan penambahan informasi nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada kop surat dan media komunikasi lainnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan identitas yang jelas dan resmi, serta menunjukkan bahwa setiap informasi dan surat yang dikeluarkan adalah bagian dari upaya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (BAPPELITBANGDA) dalam mendukung perencanaan dan pengembangan daerah. Dengan demikian, meskipun tidak memiliki logo tersendiri, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (BAPPELITBANGDA) tetap berupaya menjaga citra dan identitasnya melalui penggunaan logo daerah yang sudah dikenal oleh masyarakat.

3.1.2.1 Logo Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya



Sumber: Publikasi Pemda Kabupaten Tasikmalaya, 2024

Gambar 3. 1
Logo Kab Tasikmalaya

3.1.2.1 Makna Logo Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Logo Kabupaten Tasikmalaya mengandung makna yang mendalam. Makna ini tercermin dalam setiap elemen desain yang dipilih untuk mewakili wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Simbol-simbol yang digunakan dalam logo Kabupaten Tasikmalaya tidak hanya sekedar representasi visual atau hanya sebatas goresan gambar yang tidak memiliki nilai-nilai makna yang mendalam, tetapi memiliki sarat dengan makna kearifan lokal dan sejarah yang kaya.

Dikutip dari laman resmi pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya logo pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya memiliki makna :

- a) Menunjukkan sifat gotong royong yang berisikan pancasila; mealambangkan kepribadian; adat istiadat; kepercayaan dan kebudayaan masyarakat daerah Kabupaten Tasikmalaya, sejak dulu, sekarang dan kemudian.
- b) Gunung berwarna biru melambangkan Gunung Galunggung yang keberadaannya ada di Kabupaten Tasikmalaya dan menjadi ciri.
- c) Simbol industri melambangkan industri atau sumber penghidupan masyarakat dan kekayaan alam di daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- d) Tiga buah sungai melambangkan pemberi sumber kehidupan masyarakat.
- e) Sawah berwarna hijau terdiri dari 17 petak melambangkan kesuburan/kemakmuran masyarakat yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.
- f) Sawah berwarna kuning melambangkan sebagian kehidupan masyarakat dari kerajinan tangan.
- g) Bambu runcing yang terbuat dari bambu haur kuning melambangkan sejarah perjuangan masyarakat daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam mengusir penjajah yang bermodalkan bambu runcing.

- h) Pita kuning melambai yang bertuliskan “Sukapura Ngadaun Ngora” melambangkan kemajuan yang abadi.
- i) Warna Putih mengkilat melambangkan tekad suci.
- j) Warna hitam berartikan kekal dan abadi
- k) Warna kuning melambangkan keadaan yang gilang gemilang (keemasan)
- l) Warna hijau melambangkan kehidupan yang tinggi, adil dan subur makmur.
- m)Warna biru memberikan arti kesetiaan dan kejujuran.

3.1.3 Visi dan Misi Instansi

Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten Tasikmalaya sama dengan Visi dan Misi dari Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya yang kemudian mencetuskan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Visi dan Misi Kab Tasikmalaya

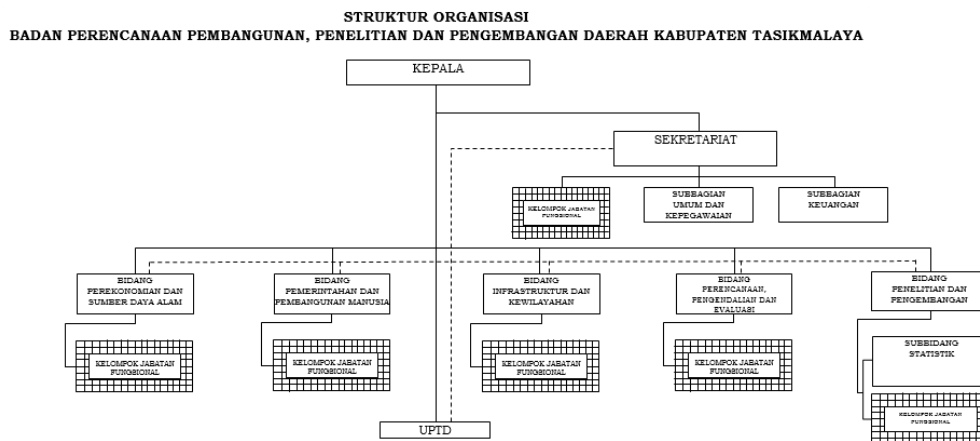
Visi	Misi
Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera	1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlipenulisl karimah 2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan profesional 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata 4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong

Visi	Misi
	pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global

Sumber: Publikasi Profil Pemda Kab Tasikmalaya, 2024

3.1.4 Struktur Organisasi Instansi

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten Tasikmalaya mengacu pada Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.



Sumber : BAPPELITBANGDA Kab. Tasikmalaya, 2024

Gambar 3. 2
Struktur Organisasi BAPPELITBANGDA Kab. Tasikmalaya

3.1.5 Data Penghasilan Karyawan

Gaji Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam sistem administrasi dan manajemen sumber daya manusia di

lingkungan pemerintahan Indonesia. Gaji tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kompensasi atas tugas, tanggung jawab, dan pengabdian yang diberikan oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada negara dan masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong motivasi kerja, meningkatkan kesejahteraan pegawai, serta menjaga profesionalisme dan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Sebagai salah satu bentuk penghargaan dari negara kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN), gaji yang diberikan telah diatur secara resmi oleh pemerintah melalui kebijakan dan regulasi yang berlaku. Ketentuan mengenai gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) ini mempertimbangkan berbagai aspek dan variabel penting, seperti golongan kepangkatan, jenjang jabatan struktural maupun fungsional, masa kerja atau masa pengabdian, serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada jabatan atau kondisi tertentu, termasuk tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, dan tunjangan daerah.

Struktur gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) secara umum mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) yang ditetapkan dan diperbarui secara berkala oleh pemerintah pusat. Pembaruan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi nasional, tingkat inflasi, kemampuan anggaran negara, serta sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara menyeluruh. Dengan demikian, kebijakan penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia merupakan bagian dari sistem birokrasi yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Dalam konteks tingkat pemerintahan daerah, gaji pegawai terkhusus di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Tasikmalaya juga mengacu dan mengikuti secara langsung ketentuan yang berlaku di tingkat nasional.

Hal ini mencerminkan prinsip keseragaman dan keadilan dalam sistem penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh wilayah Indonesia, tanpa membedakan instansi atau pemerintahan daerah, selama berada dalam ruang lingkup pemerintahan pusat dan daerah.

Sistem penggajian di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Tasikmalaya ditentukan berdasarkan regulasi nasional yang menetapkan besaran gaji pokok sesuai dengan golongan dan masa kerja pegawai.

Selain itu, pegawai juga menerima tunjangan-tunjangan lain yang diberikan berdasarkan jabatan, beban kerja, serta kondisi kerja tertentu yang melekat pada posisi masing-masing Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan adanya sistem penggajian yang terstruktur dan terstandar ini, diharapkan dapat menciptakan iklim kerja yang adil, transparan, dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah.

Berikut ini disajikan data mengenai gaji pokok Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dibedakan berdasarkan golongan kepangkatan. Data ini memberikan gambaran umum tentang kisaran pendapatan dasar yang diterima oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan jenjang karier dan masa kerja mereka, sebelum ditambahkan dengan berbagai jenis tunjangan lainnya:

Tabel 3. 2

Besaran Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Golongan

Golongan I (Juru) - Pendidikan Maksimal SMP/Sederajat		
No	Golongan	Besaran Gaji Pokok
1.	Ia – Juru Muda	Rp 1.560.800 s.d. Rp 2.335.800
2.	Ib – Juru Muda Tingkat I	Rp 1.704.500 s.d. Rp 2.472.900
3.	Ic – Juru	Rp 1.776.600 s.d. Rp 2.577.500
4.	Id – Juru Tingkat I	Rp 1.851.800 s.d. Rp 2.686.500
Golongan II (Pengatur) - Pendidikan Maksimal SMA/D3		
No	Golongan	Besaran Gaji Pokok
1.	IIa – Pengatur Muda	Rp 2.022.200 s.d. Rp 3.373.000
2.	IIb – Pengatur Muda Tingkat I	Rp 2.208.400 s.d. Rp 3.516.300
3.	IIc – Pengatur	Rp 2.301.800 s.d. Rp 3.665.000
4.	IId – Pengatur Tingkat I	Rp 2.399.200 s.d. Rp 3.820.000
Golongan III (Penata) - Pendidikan Minimal S1/D4		
No	Golongan	Besaran Gaji Pokok
1.	IIIa – Penata Muda	Rp 2.579.400 s.d. Rp 4.236.400
2.	IIIb – Penata Muda Tingkat I	Rp 2.688.500 s.d. Rp 4.415.600
3.	IIIc – Penata	Rp 2.802.300 s.d. Rp 4.602.400
4.	IIId – Penata Tingkat I	Rp 2.920.800 s.d. Rp 4.797.000
Golongan IV (Pembina) - Jabatan Tinggi dan Masa Kerja Lama		
No	Golongan	Besaran Gaji Pokok
1.	IVa – Pembina	Rp 3.044.300 s.d. Rp 5.000.000
2.	IVb – Pembina Tingkat I	Rp 3.173.100 s.d. Rp 5.211.500
No	Golongan	Besaran Gaji Pokok
3.	IVc – Pembina Utama Muda	Rp 3.307.300 s.d. Rp 5.431.900
4.	IVd – Pembina Utama Madya	Rp 3.447.200 s.d. Rp 5.661.700
5.	IVe – Pembina Utama	Rp 3.593.100 s.d. Rp 5.901.200

Sumber: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024

Selain menerima gaji pokok yang dihitung berdasarkan golongan dan masa kerja, Aparatur Sipil Negara (ASN) juga memperoleh berbagai bentuk tunjangan sebagai bagian dari total penghasilan yang diterima setiap bulannya. Tunjangan-tunjangan ini diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk penghargaan dan dukungan atas kinerja serta tanggung jawab yang diemban oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.

Beberapa jenis tunjangan yang umum diterima oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) meliputi tunjangan kinerja (tukin), tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan. Tunjangan kinerja diberikan berdasarkan capaian kinerja individu maupun unit kerja, dengan tujuan untuk mendorong produktivitas dan efisiensi kerja. Tunjangan keluarga, yang mencakup tunjangan istri/suami dan tunjangan anak, diberikan untuk membantu Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Sementara itu, tunjangan jabatan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu sebagai kompensasi atas tanggung jawab yang lebih besar.

Meskipun tunjangan-tunjangan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap total penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN), perlu dipahami bahwa sifatnya tidak tetap atau tidak bersifat permanen, karena tergantung pada kondisi dan kebijakan anggaran, capaian kinerja, serta status jabatan yang sedang diemban oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersangkutan.

Tabel 3. 3

Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Tasikmalaya

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran Perbulan
1.	Kepala Badan	14	31,576,566
2.	Sekretaris Badan	12	18,494,918
3.	Perencana Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	10	7,336,601
4.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	3,472,850
5.	Pengelola Bahan Perencanaan	6	3,014,157
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	7,304,282
7.	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	7	3,472,850
8.	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	6	3,014,157
9.	Pengelola Kepegawaian	6	3,014,157
10.	Pengadministrasian Umum	5	3,014,157

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran Perbulan
11.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	3,014,157
12.	Pengelo1a Kendaraan dan Perjalanan Dinas	6	3,014,157
13.	Pengelola Barang Milik Negara	6	4,067,465
14.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	7,304,282
15.	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	6	3,014,157
16.	Bendahara	7	4,067,465
17.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	11	11,310,823
18.	Perencana Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	10	7,336,601
19.	Analisis Perencanaan	7	3,472,850
20.	Analisis Program Pembangunan	7	3,472,850
21.	Pengelola Bahan Perencanaan	6	3,014,157
22.	Analisis Perencanaan	7	3,472,850
23.	Analisis Program Pembangunan	7	3,472,850
24.	Pengelola Bahan Perencanaan	6	3,014,157
25.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	11	11,310,823
26.	Perencana Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	10	7,336,601
27.	Analisis Perencanaan	7	3,472,850
28.	Analisis Program Pembangunan	7	3,472,850
29.	Pengelola Bahan Perencanaan	6	3,014,157
30.	Analisis Perencanaan	7	3,472,850
31.	Analisis Program Pembangunan	7	3,472,850
32.	Pengelola Bahan Perencanaan	6	3,014,157
33.	Kepala Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah	11	11,310,823
34.	Perencana Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	10	7,336,601
35.	Analisis Perencanaan	7	3,472,850
36.	Analisis Program Pembangunan	7	3,472,850
37.	Pengelola Bahan Perencanaan	6	3,014,157
38.	Analisis Perencanaan	7	3,472,850
39.	Analisis Program Pembangunan	7	3,472,850
30.	Pengelola Bahan Perencanaan	6	3,014,157
41.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	11	11,310,823
42.	Perencana Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	10	7,336,601
43.	Analisis Perencanaan Anggaran	7	3,472,850
44.	Analisis Program Pembangunan	7	3,472,850
45.	Analisis Data dan Informasi	7	3,014,157
46.	Pengelola Bahan Perencanaan	6	3,472,850
47.	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7	3,472,850

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran Perbulan
48.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	3,014,157
49.	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	6	3,014,157
50.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	11	11,310,823
51.	Peneliti Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	7,336,601
52.	Analisis Penelitian dan Pengembangan	7	3,472,850
53.	Penyusun Penelitian dan Pengembangan	7	3,472,850
54.	Pengelola Penelitian	6	3,014,157
55.	Analisis Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	7	3,472,850
56.	Penyusun Program Kreativitas dan Inovasi	7	3,472,850
57.	Pengelola Data Kreativitas dan Inovasi	6	3,014,157
58.	Kepala Sub Bidang Statistik	9	7,304,282
59.	Analisis Statistik	7	3,472,850
60.	Pengelola Data Statistik	6	3,014,157
61.	Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	10	3,472,850
62.	Perencana Ahli Muda	9	4,281,550
63.	Perencana Ahli Pertama	8	3,819,471
64.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	8	3,472,850
65.	Arsiparis	6	3,472,850
66.	Peneliti	8	3,472,850
67.	Perekayasa	8	3,472,850
68.	Pranata Komputer	6	3,472,850
69.	Perencana	10	-

Sumber: peraturan bupati tasikmalaya nomor 4 tahun 2024 tentang pemberian tam bahan penghasilan pegawai

Dalam perkembangannya, kebijakan mengenai gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sering menjadi sorotan publik, terutama terkait dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan. Reformasi birokrasi juga mendorong perubahan dalam sistem penggajian, termasuk penerapan sistem berbasis kinerja untuk memastikan bahwa setiap pegawai mendapatkan kompensasi yang adil sesuai dengan kontribusi dan kinerjanya.

Dengan adanya regulasi yang terus diperbarui dan kebijakan yang semakin transparan, diharapkan sistem penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat

mencerminkan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. (Suliyanto, 2005:12) menjelaskan bahwa “Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang didasarkan pada data kuantitatif, di mana data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan.” Sementara itu, menurut (Sugiyono, 2014:13) menjelaskan bahwa metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan teknik pengambilan sampel yang umumnya dilakukan secara acak. Pengumpulan data dilakukan dengan instrumen penelitian, analisis bersifat kuantitatif atau statistik, serta bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Explanatory Research. Menurut (Sugiyono, 2019:6), “Explanatory Research merupakan metode penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya.” Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai hubungan antara literasi keuangan dan sifat materialisme terhadap keputusan pengambilan kredit konsumtif pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan

Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Tasikmalaya, serta sejauh mana hubungan tersebut saling mempengaruhi.

Pemilihan jenis penelitian eksplanatori ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan agar dapat menjelaskan pengaruh antara variabel yang diteliti secara empiris dan sistematis.

3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga variabel yaitu literasi keuangan, sifat materialisme dan pengambilan keputusan kredit konsumtif. Terdiri dari dua variabel bebas (independen) dan satu variabel terikat (dependen).

Berikut operasionalisasi dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3. 4
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Satuan	Skala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Literasi Keuangan (X1) (OECD, 2018).	Tingkat pemahaman individu terhadap konsep dan aplikasi keuangan yang mempengaruhi pengambilan keputusan finansial	1. Pengetahuan keuangan 2. Perilaku keuangan. 3. Sikap keuangan 4. Kesadaran terhadap risiko keuangan 5. Keterampilan Keuangan	Skor kuesioner`	Ordinal
Sifat Materialisme (X2) (Anggraeni, 2021).	Orientasi individu terhadap kepemilikan materi sebagai ukuran kebahagiaan dan kesuksesan hidup	1. Kepemilikan barang sebagai kebutuhan utama 2. Membeli barang untuk kebahagiaan	Skor kuesioner	Ordinal

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		3. Kepemilikan barang sebagai status sosial		
		4. Membeli untuk kepuasan diri		
Keputusan Pengambilan Kredit Konsumtif (Y) (Kotler & Keller, 2016).	Proses yang dilalui individu dalam mempertimbangkan, memilih, dan mengevaluasi keputusan kredit	1. Kesadaran akan kebutuhan kredit 2. Mencari informasi sebelum mengambil kredit 3. Membandingkan alternatif kredit 4. Faktor utama dalam pengambilan kredit 5. Evaluasi kepuasan setelah mengambil kredit	Skor kuesioner	Ordinal

Sumber: Data diolah penulis, 2025

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi kebutuhan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara kuisioner yang dilakukan untuk mendapatkan data primer berupa jawaban individu yang diperoleh lokasi peneliti yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Menurut (Arikunto, 2013) yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data adalah “cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data penelitiannya”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa metode penelitian adalah cara yang dipergunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

3.2.3.1 Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan sifatnya, jenis data ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka yang menunjukkan nilai terhadap besaran variabel yang diwakilinya dalam waktu tertentu.

Berdasarkan sumber datanya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh tidak berhubungan langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2019). sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data melalui kuesioner. Kuesioner merupakan cara mendapatkan sumber data yang digunakan atau data yang diperoleh dari responden melalui serangkaian pertanyaan tertulis yang disusun secara sistematis. Data yang diambil berupa data yang berkaitan dengan semua variabel dalam penelitian ini, yaitu Literasi Keuangan, Sifat Materialisme, dan Kredit Konsumtif di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Kuesioner ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai persepsi Aparatur Sipil Negara di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya terkait keputusan pengambilan kredit konsumtif. Angket atau kuesioner yang akan disebarkan menggunakan skala likert, yang hasil dari angket atau kuesioner tersebut akan di optimalisasikan untuk mengetahui seberapa kuat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan skala likert yang berisi pernyataan terkait persepsi Aparatur Sipil Negara di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian,

dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan 5 (lima) skala jawaban yaitu “Sangat Setuju”, “Setuju”, “Netral”, “Tidak Setuju”, dan “Sangat Tidak Setuju”. Dari hasil angket atau kuesioner yang dibagikan hasil jawaban responden akan di-input dan diolah menggunakan aplikasi pengolah data. Berikut ini adalah perhitungan menggunakan skor jawaban skala likert.

Tabel 3. 5
Skor Jawaban Kuesioner

Skala Jawab	Nilai
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: (Sugiyono, 2013:94)

Perhitungan skor menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Skor} = T \times P_n$$

Keterangan:

T = Jumlah responden yang memilih

P_n = Pilihan Skor

Adapun perhitungan skor skala likert dapat dilihat pada Tabel 3.4

Tabel 3. 6
Perhitungan Skor Skala Likert

Jawaban	T	Jumlah
Sangat Setuju (SS)	A responden	5 x A
Setuju (S)	B responden	4 x B
Netral (N)	C responden	3 x C
Tidak Setuju (TS)	D responden	2 x D
Sangat Tidak Setuju (STS)	E responden	1 x E
		Jumlah Skor

Sumber: (Sugiyono, 2013:94)

3.2.3.1 Populasi Sasaran

Menurut (Sugiyono, 2019) Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi yang dipakai adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 39 orang.

3.2.3.1 Penentuan Sampel

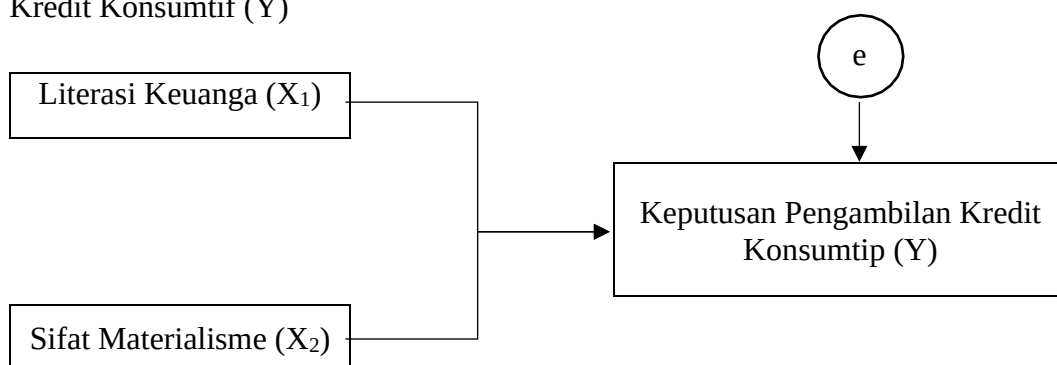
Menurut (Sugiyono, 2019) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang dimaksud adalah sebagian dari populasi dengan syarat bisa menjadi bahan perwakilan dari populasi yang dimiliki. Jadi dapat disimpulkan bahwa sampel merupakan suatu bagian yang mewakili dari populasi karena ketidakmungkinan peneliti dapat meneliti seluruh anggota populasi, oleh karena itu kita membentuk sebuah perwakilan populasi yang disebut sampel.

Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan melalui teknik Sensus. Teknik Sensus sampling (sampling jenuh) menurut (Sugiyono, 2019) yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang diinginkan.

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 39 orang.

3.3 Model Penelitian

Model penelitian dalam penelitian ini diambil dari hubungan antara variabel Literasi Keuangan (X_1), Sifat Materialisme (X_2) dan Keputusan Pengambilan Kredit Konsumtif (Y)



Sumber: Data diolah penulis, 2025

Gambar 3. 3
Model Penelitian

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis penelitian apakah variabel bebas (Literasi Keuangan dan Sifat Materialisme) ini berpengaruh terhadap variabel terikat (Kredit Konsumtif), baik secara simultan maupun secara parsial. Pada penelitian ini penulis menggunakan SPSS 26 untuk pengolahan data.

3.4.1 Uji Instrumen

Dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk menguji pengaruh literasi keuangan dan sifat materialisme terhadap keputusan pengambilan kredit konsumtif pada Aparatur Sipil Negara di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Tasikmalaya, kualitas data yang akurat dan reliabel sangat penting. Oleh karena itu, uji instrumen menjadi langkah krusial dalam metodologi penelitian ini. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, yang dirancang untuk mengukur variabel-variabel berikut: literasi keuangan, sifat materialisme, dan keputusan pengambilan kredit konsumtif.

1. Validitas Instrumen

Untuk memastikan validitas instrumen, terutama kuesioner, penelitian ini akan menggunakan beberapa pendekatan, sesuai dengan yang dianjurkan oleh para ahli:

a. Validitas Isi

"Validitas isi mengukur sejauh mana isi alat ukur mewakili keseluruhan kawasan isi objek yang diukur" (Arikunto, 2010). Sejalan dengan pendapat ini, validitas isi akan dinilai melalui validasi ahli. Kuesioner akan diberikan kepada para ahli di bidang keuangan dan perilaku konsumen untuk menilai apakah item-item pertanyaan telah mencakup semua aspek dari variabel-variabel yang diukur.

b. Validitas Konstruksi

Menurut (Sugiyono, 2019), "Validitas konstruk berkaitan dengan sejauh mana instrumen mengukur konsep teoritis yang dimaksud." Oleh karena itu, validitas konstruk akan diuji dengan menggunakan analisis faktor. Analisis ini akan digunakan untuk melihat apakah item-item pertanyaan dalam kuesioner benar-benar mengukur konstruk teoritis

yang mendasarinya, yaitu literasi keuangan, sifat materialisme, dan keputusan pengambilan kredit konsumtif.

c. Validitas Kriteria

Walaupun tidak selalu harus ada validitas kriteria bisa dilakukan, dengan membandingkan hasil kuesioner dengan data sekunder, yaitu data pengambilan kredit konsumtif dari sub-bagian Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

2. Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas instrumen akan diuji dengan menggunakan metode Cronbach's alpha. "Cronbach's alpha digunakan untuk mengukur konsistensi internal dari item-item dalam suatu skala" (Gliem J.A., 2003). Metode ini akan digunakan untuk mengukur konsistensi internal dari item-item pertanyaan dalam kuesioner. Nilai Cronbach's alpha yang tinggi (umumnya di atas 0,70) menunjukkan bahwa instrumen memiliki reliabilitas yang baik.

3.4.2 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik responden dan variabel-variabel yang diteliti. "Analisis deskriptif memberikan dasar untuk analisis inferensial, yang bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian," ungkap (Field, 2018). Analisis deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik responden dan variabel penelitian, mengidentifikasi pola dan trend dalam data, serta memberikan dasar untuk analisis inferensial selanjutnya. Dengan demikian, analisis

deskriptif merupakan langkah penting dalam proses penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif akan mencakup:

1. Demografi dan Karakteristik Responden

"Demografi responden, seperti usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan, memberikan konteks penting untuk memahami perilaku konsumen," ungkap (Kotler, 2016). Dalam penelitian ini, analisis demografi akan mencakup distribusi responden berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan masa kerja. Dalam analisis ini akan menunjukkan persentase responden laki-laki dan perempuan, rentang usia dominan, serta tingkat pendidikan terbanyak. Informasi ini penting untuk memahami latar belakang sosial-ekonomi responden.

2. Deskripsi Variabel

Analisis deskriptif, sebagaimana dijelaskan oleh (Sugiyono, 2019), bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik responden dan variabel-variabel yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, analisis deskriptif akan digunakan untuk memahami profil ASN di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan literasi keuangan, sifat materialisme, dan keputusan pengambilan kredit konsumtif.

"Literasi keuangan dan sifat materialisme adalah konstruk psikologis yang kompleks, dan analisis deskriptif membantu kita memahami bagaimana konstruk ini terdistribusi dalam populasi penelitian," kata

(Cohen, 1988) Analisis deskriptif akan menyajikan rata-rata skor literasi keuangan dan sifat materialisme, standar deviasi, serta distribusi frekuensi. Contohnya, analisis akan menunjukkan persentase responden dengan tingkat literasi keuangan tinggi dan tingkat materialisme tinggi. Informasi ini penting untuk memahami kecenderungan responden terkait dengan variabel-variabel tersebut.

Analisis deskriptif akan menyajikan distribusi frekuensi responden yang pernah mengambil kredit konsumtif, jenis kredit yang diambil, dan frekuensi pengambilan kredit. Hasil analisis akan menunjukkan persentase responden yang pernah mengambil kredit kendaraan atau kredit elektronik, serta frekuensi pengambilan kredit dalam periode waktu tertentu. Informasi ini penting untuk memahami pola pengambilan kredit konsumtif di kalangan Apratur Sipil Negara (ASN).

3. Tabel dan Grafik

Hasil analisis deskriptif akan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi demografi responden, grafik batang rata-rata skor literasi keuangan dan sifat materialisme, serta grafik lingkaran persentase responden yang pernah mengambil kredit konsumtif. Penyajian data yang jelas dan informatif ini penting untuk mengkomunikasikan temuan penelitian kepada pembaca.

3.4.3 Kriteria Persentase

Dalam mengukur atau menilai di masing-masing pernyataan dan variabel diperlukan klasifikasi penilaian untuk mengukur sejauh mana tingkat atau nilai dari

setiao setiap indikator dan variabel. Menurut (Arikunto, 2010), klasifikasi untuk penilaian variabel yaitu:

Tabel 3. 7
Kriteria Persentase Skor Jawaban Responden
Tiap Indikator dan Variabel

Baik	76% - 100%
Cukup	56% - 75%
Kurang Baik	40% - 55 %
Tidak Baik	Kurang dari 40%

Sumber: Arikunto (2010: 246)

Apabila dalam hasil perhitungan diperoleh nilai diantara 76%-100% maka tiap indikator atau variabel dikatakan “Baik”, apabila nilai perolehan diatas 56%-75% maka tiap indikator atau variabel yang memperoleh nilai tersebut dapat dikatakan “Cukup”, apabila nilai perolehan diatas 40%-55% maka tiap indikator atau variabel yang memperoleh nilai tersebut dapat dikatakan “Kurang baik”, dan apabila nilai perolehan kurang dari 40% maka tiap indikator atau variabel yang memperoleh nilai tersebut dapat dikatakan “Tidak baik”,

3.4.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (Sugiyono, 2019). Jadi analisis regresi linier berganda dilakukan apabila terdapat minimal dua variabel independen.

Adapun bentuk model analisis regresi berganda dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Pengambilan Keputusan Kredit Konsumtif

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi Literasi Keuangan

β_2 = Koefisien regresi Sifat Materialisme

X1 = Literasi Keuangan

X2 = Sifat Materialisme

e = Standar Error

3.4.5 Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi merupakan seberapa baik suatu model untuk menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R² yang semakin tinggi menjelaskan bahwa semakin cocok variabel independen menjelaskan variabel dependen (Imam, 2011). Semakin kecil nilai R² berarti semakin sedikit kemampuan variabel-variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen.

$$Kd = (r^2) \times 100\%$$

Keterangan

Kd = Koefisien Determinasi

r = Koefisien korelasi

3.4.6 Uji Hipotesis

1. Uji Kesesuaian Model (Uji F)

Uji kesesuaian model dapat dilakukan melalui uji F di mana digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang ada layak atau tidak (Ferdinand, 2014).

Model regresi yang layak dapat menjelaskan bagaimana variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Model regresi dapat dilihat melalui tabel ANOVA. Apabila nilai F hitung (Sig.) lebih kecil dari 0,05, maka dinyatakan model regresi tersebut layak.

Penetapan hipotesis uji F sebagai berikut:

H_0 = Literasi Keuangan dan Sifat Materialisme tidak terbukti menjadi prediktor dari Keputusan Pengambilan Kredit Konsumtif oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

H_a = Literasi Keuangan dan Sifat Materialisme terbukti menjadi prediktor dari Keputusan Pengambilan Kredit Konsumtif oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Tingkat signifikansi (α) ditetapkan sebesar 5% atau 0,05 yang memberikan tingkat kepercayaan sebesar 95% untuk kebenaran dan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian. Adapun kriteria keputusan uji F sebagai berikut.

- Tolak H_0 , terima H_a : jika signifikansi $F \leq (\alpha = 5\%)$
- Terima H_0 , tolak H_a : jika signifikansi $F > (\alpha = 5\%)$

Dari kriteria keputusan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

- 1) Jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ atau 5%, maka hipotesis kedua (H_a) diterima. Artinya, Literasi Keuangan dan Sifat Materialisme terbukti menjadi prediktor dari Keputusan Pengambilan Kredit Konsumtif oleh

Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

- 2) Jika nilai signifikansi $> 0,05$ atau 5%, maka hipotesis pertama (H_0) diterima. Artinya, Literasi Keuangan dan Sifat Materialisme tidak terbukti menjadi prediktor dari Keputusan Pengambilan Kredit Konsumtif oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

2. Uji Signifikansi Koefisien Regresi (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen Imam (2011). Dikatakan secara individual variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen apabila nilai t hitung $> t$ tabel atau nilai signifikansi uji t $< 0,05$. Penetapan hipotesis uji t sebagai berikut.

H_{01} = Literasi Keuangan tidak berpengaruh terhadap Keputusan Pengambilan Kredit Konsumtif oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

H_{a1} = Literasi Keuangan berpengaruh terhadap Keputusan Pengambilan Kredit Konsumtif oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

H_{02} = Sifat Materialisme tidak berpengaruh terhadap Keputusan Pengambilan Kredit Konsumtif oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

H_{a2} = Sifat Materialisme berpengaruh terhadap Keputusan Pengambilan Kredit Konsumtif oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Tingkat signifikansi (α) ditetapkan sebesar 5% atau 0,05 yang memberikan tingkat kepercayaan sebesar 95% untuk kebenaran dan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian. Adapun kriteria keputusan uji t sebagai berikut.

- Tolak H_0 , terima H_a : jika signifikansi $t \leq (\alpha = 5\%)$
- Terima H_0 , tolak H_a : jika signifikansi $t > (\alpha = 5\%)$

Dari kriteria keputusan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

- 1) Jika nilai signifikansi t variabel literasi keuangan (X_1) $\leq 0,05$ atau 5%, maka H_{a1} diterima. Artinya, Literasi Keuangan berpengaruh terhadap Keputusan Pengambilan Kredit Konsumtif oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- 2) Jika nilai signifikansi t variabel literasi keuangan (X_1) $> 0,05$ atau 5%, maka H_{o1} diterima. Artinya, Literasi Keuangan tidak berpengaruh terhadap Keputusan Pengambilan Kredit Konsumtif oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

- 3) Jika nilai signifikansi t variabel sifat materialisme (X_2) $\leq 0,05$ atau 5%, maka H_{a2} diterima. Artinya, Sifat Materialisme berpengaruh terhadap Keputusan Pengambilan Kredit Konsumtif oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- 4) Jika nilai signifikansi t variabel sifat materialisme (X_2) $> 0,05$ atau 5%, maka H_{o2} diterima. Artinya, Sifat Materialisme tidak berpengaruh terhadap Keputusan Pengambilan Kredit Konsumtif oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

3. Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan apakah hipotesis yang ditetapkan akan diterima atau ditolak. Selain itu, untuk perhitungan alat analisis dalam pembahasan akan menggunakan IBM SPSS versi 26. Secara keseluruhan, temuan ini mengindikasikan bahwa sifat materialisme tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pengambilan kredit konsumtif pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Tasikmalaya. Pengaruh ini mungkin lebih dipengaruhi oleh faktor lain, seperti literasi keuangan dan stabilitas finansial yang lebih dominan dalam kelompok ini. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Tasikmalaya dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan terkait

kredit konsumtif, serta meningkatkan kesehatan finansial mereka secara keseluruhan